Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 593-614
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.915
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Beyond Human Development Index: Telaah Konseptual IPM dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya terhadap Pencapaian Maqāṣid al-Sharī'ah

Teuku Bayu Agus Wandayu
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung, Indonesia.
Tamba Tua Manik
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung, Indonesia.
Ratih Ajeng Kusuma
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung, Indonesia.
Ibnu Mas'ud
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung, Indonesia
Email: bayusyamtalira.partners@gmail.com[1], bungtamanmanikmanik@gmail.com[2], ratihajengkusumawardani@stisdulamtim.ac.id[3], **ibnumasud@stisdulamtim.ac.id[4]**.

Korespondensi penulis: bayusyamtalira.partners@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze the Human Development Index (HDI) from the perspective of Islamic economics and examine its relevance to the achievement of maqāṣid al-sharī'ah. Using a qualitative approach through a conceptual and library research method, this study reviews various scholarly works, books, and international reports related to human development, Islamic economics, and maqāṣid al-sharī'ah. The analysis reveals that the three core dimensions of HDI health, education, and decent living standards are conceptually aligned with several objectives of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and wealth (ḥifẓ al-māl). However, HDI remains limited in capturing broader dimensions of human welfare emphasized in Islamic economics, such as spirituality, moral development, family integrity, social justice, and ethical governance. Consequently, HDI alone cannot fully represent the holistic concept of welfare embodied in the notion of falāḥ. This study proposes the development of an Islamic Human Development Framework (IHDF) that integrates conventional human development indicators with the principles of maqāṣid al-sharī'ah. Such a framework is expected to provide a more comprehensive measurement of human development by encompassing material, social, moral, and spiritual dimensions. The findings contribute to the discourse on Islamic development theory and offer an alternative perspective for evaluating human welfare in Muslim societies.*

Keywords: Human Development Index, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Human Development, Falāḥ.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perspektif ekonomi Islam serta mengkaji relevansinya terhadap pencapaian maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dan telaah konseptual dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan internasional yang berkaitan dengan pembangunan manusia, ekonomi Islam, dan maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, memiliki kesesuaian konseptual dengan beberapa tujuan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan harta (ḥifẓ al-māl). Namun demikian, IPM masih memiliki keterbatasan dalam mengukur dimensi kesejahteraan yang lebih luas menurut ekonomi Islam, seperti spiritualitas, pembangunan moral, ketahanan keluarga, keadilan sosial, dan tata kelola yang beretika. Oleh karena itu, IPM belum sepenuhnya mampu merepresentasikan konsep kesejahteraan holistik yang tercermin dalam konsep falāḥ. Penelitian ini menawarkan pengembangan Islamic Human Development Framework (IHDF) yang mengintegrasikan indikator pembangunan manusia modern dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Kerangka tersebut

Received Febuary 07, 2026; Revised March 2, 2026; March 30, 2026
*Corresponding author, 03ikhsankurniawan@gmail.com.

diharapkan mampu menghasilkan pengukuran pembangunan manusia yang lebih komprehensif dengan mencakup dimensi material, sosial, moral, dan spiritual. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembangunan Islam serta menawarkan perspektif alternatif dalam evaluasi kesejahteraan masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Pembangunan Manusia, Falāḥ.

LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia telah menjadi paradigma dominan dalam diskursus pembangunan global sejak diperkenalkannya konsep Human Development Index (HDI) oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada awal dekade 1990-an. Pergeseran paradigma tersebut menandai perubahan mendasar dari pendekatan pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam kerangka ini, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan pendapatan nasional atau pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan juga melalui peningkatan kualitas hidup manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2024).

Human Development Index kemudian berkembang menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara untuk mengukur capaian pembangunan manusia. Indeks ini dibangun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan melalui angka harapan hidup, akses terhadap pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang direpresentasikan melalui pendapatan nasional bruto per kapita. Kesederhanaan metodologis dan kemudahan komparasi antarnegara menjadikan HDI sebagai instrumen yang diterima secara luas dalam evaluasi pembangunan nasional maupun internasional.

Meskipun demikian, berbagai kritik terhadap HDI terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas persoalan pembangunan manusia di era kontemporer. Beberapa akademisi menilai bahwa HDI masih terlalu menekankan dimensi material dan kuantitatif sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap kualitas kehidupan manusia secara utuh. Indikator pendidikan misalnya hanya mengukur lama pendidikan tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan yang diterima. Demikian pula indikator pendapatan belum mampu menggambarkan distribusi kesejahteraan, tingkat keadilan

sosial, maupun kualitas kehidupan spiritual masyarakat. Akibatnya, suatu negara dapat memperoleh skor HDI yang tinggi namun pada saat yang sama menghadapi berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan ekonomi, krisis moral, degradasi lingkungan, meningkatnya tingkat kriminalitas, serta melemahnya kohesi sosial.

Kritik yang lebih mendasar muncul dari kalangan sarjana ekonomi Islam yang memandang bahwa paradigma pembangunan manusia modern masih berakar pada worldview sekuler yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan tanpa mempertimbangkan hubungan transendental antara manusia dengan Tuhan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan manusia tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga membentuk keseimbangan antara kebutuhan jasmani, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, ukuran pembangunan yang hanya berfokus pada aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dianggap belum mampu merepresentasikan konsep kesejahteraan manusia secara komprehensif menurut ajaran Islam.

Ekonomi Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep pembangunan dalam Islam berorientasi pada pencapaian falāḥ, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Konsep falāḥ tersebut memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep welfare dalam ekonomi konvensional karena mencakup kesejahteraan material sekaligus spiritual. Dengan demikian, pembangunan manusia menurut Islam tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam memperoleh pendapatan, tetapi juga membentuk kualitas moral, keimanan, keadilan sosial, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam tradisi intelektual Islam, tujuan utama syariat dirumuskan melalui konsep maqāṣid al-sharī‘ah yang secara umum mencakup perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql), perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima tujuan tersebut menjadi fondasi normatif dalam seluruh aktivitas ekonomi, sosial, politik, maupun pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan dalam perspektif Islam semestinya diukur berdasarkan sejauh mana pembangunan tersebut mampu mendukung terwujudnya lima tujuan pokok syariat tersebut.

Perkembangan literatur ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap integrasi maqāṣid al-sharī‘ah ke dalam pengukuran pembangunan manusia. Sejumlah penelitian mencoba mengembangkan indeks pembangunan berbasis maqāṣid sebagai alternatif atau pelengkap HDI. Upaya tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa indikator pembangunan konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dimensi spiritual dan moral yang menjadi bagian integral dari kesejahteraan manusia dalam Islam. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa negara dengan skor HDI tinggi belum tentu memiliki capaian maqāṣid yang tinggi, sementara beberapa negara dengan tingkat pendapatan menengah justru menunjukkan performa yang relatif baik dalam indikator-indikator yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam seperti distribusi kekayaan, solidaritas sosial, dan kualitas kehidupan keluarga.

Diskursus mengenai hubungan antara pembangunan manusia dan maqāṣid al-sharī‘ah menjadi semakin relevan dalam konteks negara-negara Muslim yang sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan multidimensional. Di satu sisi, negara-negara tersebut berupaya meningkatkan posisi mereka dalam peringkat HDI global melalui investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya ketimpangan sosial, korupsi, degradasi moral, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan beragama dan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan manusia tidak selalu berjalan seiring dengan pencapaian tujuan-tujuan syariat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga menghadapi dinamika yang serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun demikian, berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi pendapatan, korupsi, penyalahgunaan narkotika, disintegrasi keluarga, serta rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peningkatan IPM benar-benar mencerminkan kualitas pembangunan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs) turut memperluas perdebatan mengenai indikator pembangunan yang lebih holistik dan inklusif. Meskipun SDGs telah memasukkan aspek keberlanjutan, keadilan, dan inklusivitas sosial, sebagian sarjana ekonomi Islam berpendapat bahwa dimensi spiritual tetap belum memperoleh perhatian yang memadai. Dalam perspektif Islam, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan dan masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai sumber nilai dan tujuan akhir kehidupan.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengembangan indeks maqāṣid al-sharī‘ah atau analisis empiris hubungan antara indikator pembangunan dan variabel ekonomi Islam. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus melakukan telaah konseptual mengenai relevansi Human Development Index terhadap pencapaian maqāṣid al-sharī‘ah. Padahal kajian konseptual sangat penting untuk membangun kerangka teoritis yang dapat menjelaskan titik temu maupun perbedaan fundamental antara paradigma pembangunan manusia modern dan paradigma pembangunan dalam ekonomi Islam.

Kesenjangan literatur tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai posisi HDI dalam perspektif ekonomi Islam. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah apakah dimensi-dimensi yang digunakan dalam HDI telah sejalan dengan tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, sejauh mana HDI mampu merepresentasikan konsep kesejahteraan menurut Islam, serta bagaimana relevansi HDI dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berorientasi pada falāḥ. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori pembangunan Islam sekaligus menjadi dasar dalam perumusan indikator pembangunan yang lebih komprehensif bagi negara-negara Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual Human Development Index dalam perspektif ekonomi Islam serta mengevaluasi relevansinya terhadap pencapaian maqāṣid al-sharī‘ah. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam mengenai pembangunan manusia, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap penggunaan indikator pembangunan konvensional dalam konteks masyarakat Muslim. Lebih jauh, penelitian ini berupaya

menjelaskan bahwa pembangunan manusia yang ideal dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial, tetapi juga pada pembentukan kualitas spiritual, moral, dan keberlanjutan kehidupan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat konseptual dan normatif. Kajian dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi artikel jurnal bereputasi, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen resmi pembangunan manusia, serta literatur ekonomi Islam yang membahas Human Development Index (HDI), pembangunan manusia, maqāṣid al-sharī‘ah, dan konsep falāḥ. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis konstruksi teoritis mengenai pembangunan manusia dalam paradigma konvensional dan paradigma ekonomi Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah nasional maupun internasional dalam rentang waktu yang relevan dengan perkembangan teori pembangunan manusia dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan menelaah secara sistematis hubungan antara dimensi-dimensi Human Development Index, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, dengan tujuan-tujuan utama maqāṣid al-sharī‘ah yang meliputi perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara kritis untuk menilai relevansi, kontribusi, serta keterbatasan Human Development Index dalam merepresentasikan pembangunan manusia yang holistik berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai posisi Human Development Index dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-sharī‘ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Konsep Human Development Index dalam Teori Pembangunan Modern

Konsep pembangunan manusia lahir sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan ekonomi yang selama beberapa dekade didominasi oleh indikator pertumbuhan pendapatan nasional. Pada periode pasca-Perang Dunia II, keberhasilan pembangunan umumnya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan pendapatan per kapita. Pendekatan tersebut kemudian mendapat kritik karena gagal menjelaskan berbagai fenomena sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, rendahnya kualitas pendidikan, dan buruknya layanan kesehatan yang tetap terjadi meskipun suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kritik tersebut mendorong munculnya paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada manusia (people-centered development) (Todaro & Smith, 2021).

Perkembangan penting terjadi ketika Mahbub ul Haq bersama Amartya Sen memperkenalkan Human Development Index (HDI) melalui laporan pembangunan manusia UNDP tahun 1990. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas pilihan dan kemampuan manusia (capabilities) untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam perspektif tersebut, manusia bukan sekadar instrumen pembangunan, melainkan tujuan utama pembangunan itu sendiri (Haq, 1995; Sen, 1999). Oleh karena itu, HDI dibangun atas tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang dianggap mewakili kemampuan dasar manusia untuk berkembang.

Perkembangan Human Development Index tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma ekonomi pembangunan yang terjadi sejak dekade 1970-an. Pada periode tersebut, berbagai negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, tetapi peningkatan pendapatan nasional tidak selalu diikuti oleh perbaikan kualitas hidup masyarakat secara merata. Fenomena ini melahirkan kritik terhadap pendekatan growth-oriented development yang dianggap terlalu menekankan akumulasi modal dan ekspansi ekonomi tanpa memperhatikan distribusi manfaat pembangunan. Para ekonom pembangunan kemudian mulai mengarahkan perhatian pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) sebagai fondasi kesejahteraan manusia (Streeten et al.,

1981). Pergeseran tersebut menjadi landasan konseptual bagi lahirnya pendekatan pembangunan manusia pada dekade berikutnya.

Pendekatan kapabilitas (capability approach) yang dikembangkan oleh Sen (1999) memberikan kontribusi teoritis yang sangat signifikan terhadap konstruksi HDI. Menurut pendekatan ini, kesejahteraan manusia tidak cukup diukur berdasarkan kepemilikan sumber daya atau tingkat pendapatan, tetapi harus dilihat dari kemampuan individu untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi fungsi kehidupan yang bernilai (valuable functionings). Dengan kata lain, pembangunan harus memperluas kebebasan substantif manusia untuk memilih kehidupan yang mereka hargai. Perspektif ini kemudian menggeser fokus pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju perluasan kesempatan dan kebebasan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam perkembangannya, metodologi HDI juga mengalami sejumlah penyempurnaan untuk meningkatkan akurasi pengukuran pembangunan manusia. Pada tahun 2010, UNDP melakukan revisi terhadap metode perhitungan HDI dengan mengganti indikator Produk Domestik Bruto per kapita menjadi Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income per capita) serta mengubah pendekatan agregasi dari rata-rata aritmetika menjadi rata-rata geometrik. Perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi efek substitusi antarindikator dan menghasilkan ukuran yang lebih sensitif terhadap ketimpangan capaian pembangunan pada setiap dimensi (Klugman et al., 2011). Reformasi metodologis ini menunjukkan bahwa HDI merupakan instrumen yang terus berkembang mengikuti dinamika teori dan praktik pembangunan global.

Selain itu, munculnya berbagai indeks turunan seperti Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI), Gender Development Index (GDI), Gender Inequality Index (GII), dan Multidimensional Poverty Index (MPI) mencerminkan pengakuan bahwa pembangunan manusia memiliki karakter yang kompleks dan multidimensional. Kehadiran indeks-indeks tersebut merupakan respons terhadap kritik bahwa HDI konvensional belum mampu menangkap ketimpangan sosial, diskriminasi gender, maupun kemiskinan multidimensi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak lagi dipahami sebagai peningkatan rata-rata capaian nasional semata, melainkan juga sebagai upaya memastikan pemerataan kesempatan dan kualitas hidup bagi seluruh kelompok masyarakat (Alkire & Foster, 2010).

Meskipun berbagai penyempurnaan telah dilakukan, perdebatan akademik mengenai kecukupan HDI sebagai indikator kesejahteraan masih terus berlangsung hingga saat ini. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor HDI tinggi tidak selalu memiliki tingkat kebahagiaan, kualitas institusi, integritas sosial, maupun keberlanjutan lingkungan yang tinggi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia merupakan konsep yang jauh lebih luas dibandingkan tiga dimensi yang digunakan dalam HDI. Oleh karena itu, berbagai pendekatan alternatif mulai dikembangkan, termasuk pendekatan berbasis kesejahteraan subjektif, pembangunan berkelanjutan, serta pembangunan berbasis nilai-nilai agama dan etika, yang berupaya melengkapi keterbatasan paradigma pembangunan manusia modern (Costanza et al., 2016; Fleurbaey, 2009). Dengan demikian, diskursus mengenai pembangunan manusia terus bergerak menuju pemahaman yang lebih holistik dan integratif.

Konsep Pembangunan Manusia dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pembangunan manusia tidak dipahami semata-mata sebagai peningkatan kemampuan ekonomi atau produktivitas individu, melainkan sebagai proses penyempurnaan manusia secara menyeluruh yang mencakup aspek material dan spiritual. Konsep pembangunan Islam berangkat dari pandangan dunia (Islamic worldview) yang menempatkan manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, tujuan pembangunan bukan hanya mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi juga mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang dikenal dengan konsep falāḥ (Chapra, 2008).

Konsep falāḥ memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Menurut Chapra (2008), kesejahteraan dalam Islam mencakup terpenuhinya kebutuhan fisik, intelektual, sosial, moral, dan spiritual secara seimbang. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan pendapatan atau akses terhadap layanan publik, tetapi juga berdasarkan kualitas keimanan, akhlak, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dalam Islam bersifat multidimensional dan terintegrasi.

Kerangka normatif pembangunan manusia dalam ekonomi Islam berakar pada konsep maqāṣid al-sharī‘ah yang dirumuskan secara sistematis oleh Abu Hamid al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi. Konsep tersebut menegaskan bahwa seluruh aktivitas sosial dan ekonomi harus diarahkan untuk melindungi agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Auda, 2008). Oleh karena itu, pembangunan manusia yang ideal dalam Islam adalah pembangunan yang mampu menjaga dan mengembangkan kelima dimensi tersebut secara simultan.

Konsep pembangunan manusia dalam ekonomi Islam pada hakikatnya berangkat dari prinsip tawḥīd yang menegaskan kesatuan hubungan antara manusia, alam, dan Allah SWT sebagai Pencipta. Prinsip ini membentuk paradigma pembangunan yang berbeda dengan pendekatan sekuler karena seluruh aktivitas ekonomi dan sosial dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus diarahkan untuk mencapai keridaan Allah. Oleh sebab itu, pembangunan manusia tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup secara material, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual, moral, dan etika yang menjadi fondasi kehidupan individu maupun masyarakat (Naqvi, 2003). Dalam konteks ini, manusia diposisikan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan dirinya, masyarakat, dan lingkungan.

Selain berlandaskan prinsip tawḥīd, pembangunan manusia dalam Islam juga bertumpu pada konsep khilāfah. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki amanah untuk mengelola sumber daya secara adil, produktif, dan berkelanjutan. Konsep ini mengandung implikasi bahwa pembangunan tidak boleh menghasilkan eksploitasi yang berlebihan, ketimpangan sosial yang ekstrem, maupun kerusakan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan harus menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia terhadap generasi sekarang dan mendatang (Chapra, 2000). Dengan demikian, pembangunan manusia dalam Islam memiliki orientasi keberlanjutan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ekologis dan sosial.

Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, pembangunan manusia juga dikaitkan dengan konsep tazkiyah atau proses penyucian dan pengembangan diri. Menurut perspektif ini, pembangunan yang ideal tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kapasitas produktif manusia, tetapi juga membentuk karakter yang berlandaskan nilai-

nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Individu yang mengalami proses tazkiyah secara optimal diharapkan mampu mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual sehingga tidak terjebak pada perilaku konsumtif maupun orientasi duniawi yang berlebihan (Ahmad, 2002). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan manusia dalam Islam tidak hanya tercermin pada capaian ekonomi, tetapi juga pada kualitas akhlak dan perilaku sosial masyarakat.

Pembangunan manusia dalam ekonomi Islam menempatkan keadilan (‘adl) sebagai prinsip fundamental dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup distribusi kesejahteraan yang proporsional agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang bertujuan mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan demikian, pembangunan manusia dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan sosial sebagai prasyarat terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di samping itu, konsep pembangunan manusia dalam Islam memiliki orientasi jangka panjang yang melampaui kehidupan dunia. Jika paradigma pembangunan modern umumnya berfokus pada peningkatan kualitas hidup selama masa kehidupan manusia di dunia, maka Islam memandang pembangunan sebagai sarana untuk mempersiapkan kebahagiaan dunia dan akhirat secara bersamaan. Perspektif ini menjadikan dimensi spiritual sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses pembangunan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya angka harapan hidup, pendidikan, atau pendapatan, tetapi juga oleh sejauh mana pembangunan tersebut mampu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Inilah yang membedakan secara mendasar konsep pembangunan manusia dalam ekonomi Islam dengan paradigma pembangunan manusia yang berkembang dalam tradisi ekonomi konvensional (Chapra, 2008; Al-Attas, 1995).

Analisis Kesesuaian Dimensi IPM dengan Maqāṣid al-Sharī‘ah

Secara konseptual, terdapat sejumlah titik temu antara dimensi HDI dan tujuan maqāṣid al-sharī‘ah. Dimensi kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup memiliki keterkaitan erat dengan tujuan ḥifẓ al-nafs atau perlindungan jiwa. Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi melalui penyediaan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, sanitasi yang baik, serta lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian maqāṣid al-sharī‘ah (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Dimensi pendidikan dalam HDI juga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan ḥifẓ al-‘aql atau perlindungan akal. Pendidikan memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan berpikir, memperoleh pengetahuan, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam Islam, pencarian ilmu bahkan diposisikan sebagai kewajiban yang memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan manusia yang sejalan dengan tujuan syariat (Rosly, 2010).

Sementara itu, dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pendapatan per kapita memiliki hubungan dengan ḥifẓ al-māl atau perlindungan harta. Islam mengakui pentingnya aktivitas ekonomi dan akumulasi kekayaan sepanjang dilakukan secara halal dan digunakan untuk kemaslahatan. Pendapatan yang memadai memungkinkan individu memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi secara produktif. Dalam konteks ini, dimensi ekonomi HDI dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung realisasi tujuan perlindungan harta dan kesejahteraan masyarakat (Ahmed, 2002).

Meskipun demikian, kesesuaian tersebut masih bersifat parsial karena HDI hanya mencakup tiga dari lima tujuan utama maqāṣid al-sharī‘ah. Dimensi perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) belum memperoleh representasi yang memadai dalam konstruksi HDI. Padahal kedua dimensi tersebut memiliki posisi sentral dalam pembangunan manusia menurut Islam karena berkaitan dengan keberlangsungan nilai, moralitas, integritas keluarga, dan kualitas generasi masa depan (Auda, 2008).

Selain keterkaitan langsung antara dimensi kesehatan dengan ḥifẓ al-nafs, dimensi tersebut juga memiliki hubungan tidak langsung dengan tujuan-tujuan maqāṣid al-sharī‘ah lainnya. Individu yang sehat secara fisik dan mental memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalankan kewajiban agama, menuntut ilmu, bekerja secara produktif, serta membina keluarga yang berkualitas. Dalam perspektif Islam, kesehatan bukan sekadar kondisi biologis, melainkan bagian dari nikmat dan amanah yang harus dijaga untuk mendukung pelaksanaan fungsi kekhalifahan manusia di bumi. Oleh karena itu, investasi pada sektor kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk realisasi kemaslahatan yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Pada dimensi pendidikan, kesesuaian dengan maqāṣid al-sharī‘ah tidak hanya terbatas pada aspek ḥifẓ al-‘aql, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ḥifẓ al-dīn. Pendidikan dalam Islam tidak semata-mata berfungsi mentransfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga membentuk karakter, moralitas, dan kesadaran spiritual individu. Dengan demikian, sistem pendidikan yang berkualitas seharusnya mampu menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki integritas moral yang tinggi. Namun demikian, indikator pendidikan dalam IPM masih berfokus pada aspek kuantitatif seperti lama sekolah dan harapan lama sekolah sehingga belum mampu mengukur kualitas nilai, etika, dan pembentukan karakter yang menjadi bagian penting dari tujuan pendidikan Islam (Auda, 2008).

Dimensi pendapatan dalam IPM memiliki keterkaitan dengan konsep kesejahteraan ekonomi yang diakui dalam Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar mengenai orientasi penggunaan kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, peningkatan pendapatan sering kali dipandang sebagai tujuan akhir pembangunan, sedangkan dalam Islam kekayaan merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal, dikelola secara produktif, dan didistribusikan secara adil agar dapat memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, meskipun indikator pendapatan dalam IPM sejalan dengan tujuan ḥifẓ al-māl, indikator tersebut belum mampu membedakan antara kekayaan yang diperoleh secara etis dan yang diperoleh melalui praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 2008).

Kesesuaian parsial antara IPM dan maqāṣid al-sharī‘ah juga menunjukkan bahwa HDI dapat dipandang sebagai instrumen pendukung, bukan instrumen yang sepenuhnya merepresentasikan pembangunan manusia dalam Islam. Ketiga dimensi yang digunakan dalam HDI sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar yang juga diakui oleh syariat sebagai bagian dari kemaslahatan manusia. Namun, pembangunan menurut Islam tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, melainkan harus berlanjut pada penciptaan masyarakat yang berkeadilan, bermoral, berpengetahuan, dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Dengan kata lain, HDI dapat menjadi fondasi awal dalam mengukur kualitas hidup, tetapi memerlukan perluasan indikator agar lebih sesuai dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah (Mohammed et al., 2015).

Di samping itu, analisis terhadap dimensi-dimensi IPM menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk melakukan integrasi antara pendekatan pembangunan manusia modern dan paradigma pembangunan Islam. Pendekatan ini tidak harus diposisikan secara dikotomis, melainkan dapat dipadukan dalam suatu kerangka yang saling melengkapi. Aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi yang telah menjadi bagian dari IPM dapat dipertahankan sebagai indikator fundamental, sementara dimensi religiositas, kualitas keluarga, keadilan sosial, tata kelola yang baik, dan tanggung jawab lingkungan dapat ditambahkan sebagai indikator pelengkap. Melalui integrasi tersebut, pengukuran pembangunan manusia akan menjadi lebih komprehensif dan mampu mencerminkan tujuan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan keseimbangan hidup sebagaimana diidealkan dalam maqāṣid al-sharī‘ah (Bedoui, 2012; Bedoui & Mansour, 2015).

Keterbatasan IPM dalam Mengukur Kesejahteraan Perspektif Islam

Keterbatasan utama HDI dalam perspektif Islam terletak pada absennya indikator spiritualitas dan religiositas. Dalam paradigma pembangunan Islam, kualitas hubungan manusia dengan Allah merupakan aspek fundamental yang memengaruhi perilaku individu maupun kehidupan sosial. Tingginya tingkat pendidikan dan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas moral dan spiritual masyarakat. Oleh sebab itu, ukuran pembangunan yang mengabaikan dimensi spiritual berpotensi menghasilkan gambaran kesejahteraan yang tidak utuh (Chapra, 2008).

Selain itu, HDI juga belum mampu mengukur kualitas institusi sosial dan keluarga yang merupakan bagian penting dari ḥifẓ al-nasl. Fenomena meningkatnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkotika, dan degradasi moral generasi muda tidak tercermin dalam indikator HDI. Akibatnya, suatu negara dapat memperoleh nilai HDI yang tinggi meskipun menghadapi berbagai persoalan sosial yang mengancam keberlanjutan pembangunan manusia dalam jangka panjang (Bedoui, 2012).

Kritik lainnya berkaitan dengan dimensi distribusi kesejahteraan. Meskipun UNDP telah mengembangkan Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI), ukuran tersebut masih berfokus pada distribusi capaian pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam ekonomi Islam, keadilan distributif memiliki makna yang lebih luas karena mencakup kewajiban zakat, infak, sedekah, wakaf, dan mekanisme redistribusi kekayaan lainnya yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, indikator pembangunan yang sesuai dengan nilai Islam perlu memperhatikan dimensi solidaritas sosial dan keadilan ekonomi secara lebih komprehensif (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Keterbatasan lainnya dari IPM terletak pada sifatnya yang cenderung berorientasi pada hasil (outcome-oriented) tanpa memperhatikan proses pencapaian kesejahteraan itu sendiri. Dalam perspektif ekonomi Islam, proses memperoleh kesejahteraan memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hasil yang dicapai. Pendapatan yang tinggi misalnya tidak secara otomatis mencerminkan kesejahteraan apabila diperoleh melalui praktik riba, korupsi, eksploitasi, atau aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan besarnya capaian ekonomi, tetapi juga legalitas, etika, dan keberkahan dari aktivitas yang menghasilkan capaian tersebut (Iqbal & Mirakhor, 2011). Aspek ini belum terakomodasi dalam konstruksi IPM yang lebih menekankan indikator kuantitatif.

Selain mengabaikan dimensi proses, IPM juga belum mampu menangkap tingkat kohesi sosial dan solidaritas masyarakat yang merupakan elemen penting dalam pembangunan Islam. Kehidupan sosial yang harmonis, tingginya kepedulian terhadap kelompok rentan, serta kuatnya semangat gotong royong dan filantropi merupakan indikator kesejahteraan yang memiliki posisi strategis dalam ajaran Islam. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme

redistribusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat. Namun demikian, kontribusi instrumen-instrumen tersebut terhadap kualitas pembangunan manusia tidak tercermin secara eksplisit dalam pengukuran IPM (Obaidullah & Shirazi, 2015).

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan absennya indikator kualitas tata kelola (good governance) dan integritas institusional. Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, keberadaan institusi yang adil, transparan, dan akuntabel merupakan faktor penting untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan publik. Tingkat korupsi yang tinggi, lemahnya supremasi hukum, dan rendahnya akuntabilitas pemerintahan dapat menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat meskipun indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan menunjukkan tren yang positif. Dengan demikian, pembangunan manusia yang hanya diukur melalui IPM berpotensi mengabaikan faktor-faktor struktural yang sangat menentukan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Chapra, 2000).

Dari perspektif Islam, kesejahteraan juga memiliki dimensi antargenerasi (intergenerational welfare) yang belum sepenuhnya tercermin dalam IPM. Pembangunan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang memperoleh kesempatan yang sama atau bahkan lebih baik untuk berkembang. Prinsip ini berkaitan erat dengan ḥifẓ al-nasl yang menekankan pentingnya perlindungan keluarga, pendidikan anak, kualitas generasi muda, serta keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu, ukuran kesejahteraan yang mengabaikan kualitas keluarga dan keberlanjutan pembangunan berisiko memberikan gambaran yang kurang utuh mengenai kondisi pembangunan manusia yang sebenarnya (Kamali, 2008).

Perkembangan berbagai krisis global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya masalah kesehatan mental menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat direduksi hanya pada tiga dimensi yang digunakan dalam IPM. Islam memandang hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari amanah kekhalifahan yang harus dijaga secara bertanggung jawab. Kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan menurunnya kualitas kesehatan mental masyarakat merupakan ancaman nyata terhadap pencapaian maqāṣid al-sharī‘ah. Oleh karena itu, pengembangan indikator kesejahteraan berbasis Islam perlu memasukkan dimensi keberlanjutan ekologis, kesehatan psikologis, dan tanggung jawab

sosial sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (Auda, 2008; Bedoui & Mansour, 2015).

Model Pengembangan Islamic Human Development Framework Berbasis Maqāṣid al-Sharī‘ah

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, diperlukan pengembangan kerangka pembangunan manusia yang lebih komprehensif melalui integrasi antara indikator pembangunan modern dan nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah. Kerangka ini dapat disebut sebagai Islamic Human Development Framework (IHDF), yaitu model pembangunan manusia yang tidak hanya mengukur kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, tetapi juga memasukkan indikator religiositas, kualitas keluarga, keadilan sosial, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan manusia dinilai secara lebih holistik sesuai dengan tujuan syariat Islam (Bedoui & Mansour, 2015).

Dalam model tersebut, dimensi ḥifẓ al-dīn dapat diukur melalui indikator partisipasi keagamaan, literasi keislaman, integritas sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika publik. Dimensi ḥifẓ al-nafs direpresentasikan melalui indikator kesehatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup. Dimensi ḥifẓ al-‘aql diwujudkan melalui kualitas pendidikan, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dimensi ḥifẓ al-nasl dapat diukur melalui stabilitas keluarga, perlindungan anak, dan kualitas generasi muda. Sementara itu, ḥifẓ al-māl mencakup kesejahteraan ekonomi, distribusi kekayaan, inklusi keuangan syariah, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat (Mohammed et al., 2015).

Dengan demikian, Human Development Index tetap memiliki relevansi penting sebagai instrumen dasar pengukuran pembangunan manusia, namun dalam perspektif ekonomi Islam indikator tersebut perlu diperluas agar mampu merepresentasikan seluruh dimensi kesejahteraan yang terkandung dalam maqāṣid al-sharī‘ah. Integrasi antara pendekatan pembangunan manusia modern dan kerangka normatif Islam berpotensi menghasilkan model pembangunan yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan sehingga tidak hanya mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan akhir pembangunan Islam berupa falāḥ dan kemaslahatan universal.

Pengembangan Islamic Human Development Framework (IHDF) pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan Human Development Index secara keseluruhan, melainkan untuk menyempurnakan kerangka pengukuran pembangunan manusia agar lebih sesuai dengan paradigma ekonomi Islam. Dalam konteks ini, IPM dapat tetap digunakan sebagai fondasi pengukuran karena telah terbukti mampu menggambarkan capaian dasar pembangunan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, indikator-indikator tersebut perlu diintegrasikan dengan dimensi normatif yang bersumber dari maqāṣid al-sharī‘ah sehingga menghasilkan instrumen yang lebih komprehensif dalam mengukur kualitas kehidupan manusia. Pendekatan integratif ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara tuntutan pembangunan modern dan nilai-nilai spiritual Islam (Chapra, 2008).

Dalam implementasinya, IHDF dapat dikembangkan melalui pendekatan multidimensional yang mengombinasikan indikator objektif dan subjektif. Indikator objektif mencakup variabel yang dapat diukur secara statistik seperti angka harapan hidup, tingkat pendidikan, pendapatan, tingkat kemiskinan, distribusi kekayaan, dan akses terhadap layanan publik. Sementara itu, indikator subjektif dapat mencakup tingkat kepuasan hidup, persepsi terhadap keadilan sosial, kualitas hubungan keluarga, tingkat kepercayaan sosial, dan kualitas kehidupan beragama. Integrasi kedua pendekatan tersebut penting karena kesejahteraan manusia dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kondisi material yang dapat diamati, tetapi juga kondisi psikologis dan spiritual yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat (Alkire, 2010).

Kerangka IHDF dapat memanfaatkan berbagai instrumen ekonomi Islam sebagai indikator pembangunan yang khas. Tingkat penghimpunan dan distribusi zakat, efektivitas pengelolaan wakaf produktif, inklusi keuangan syariah, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam dapat dijadikan ukuran tambahan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia. Keberadaan indikator-indikator tersebut memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap tingkat solidaritas sosial dan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu, instrumen tersebut juga mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan telah diimplementasikan dalam sistem ekonomi suatu negara (Obaidullah & Shirazi, 2015).

Dari perspektif kebijakan publik, penerapan IHDF berpotensi memberikan arah baru dalam perencanaan pembangunan di negara-negara Muslim. Jika selama ini

kebijakan pembangunan sering kali berfokus pada peningkatan indikator ekonomi makro dan capaian IPM, maka pendekatan berbasis maqāṣid al-sharī‘ah akan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penguatan institusi keluarga, pembangunan karakter, peningkatan kualitas moral masyarakat, pemberantasan korupsi, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berintegritas (Mohammed & Taib, 2015).

Sebagai implikasi dari pembahasan tersebut, pengembangan Islamic Human Development Framework menawarkan peluang untuk membangun paradigma pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kerangka ini menempatkan manusia sebagai makhluk multidimensional yang memiliki kebutuhan fisik, intelektual, sosial, moral, dan spiritual secara bersamaan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan peningkatan angka statistik tertentu, tetapi juga berdasarkan sejauh mana pembangunan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), memperkuat kualitas kehidupan beragama, menjaga keberlangsungan generasi mendatang, serta mendukung tercapainya tujuan akhir syariat. Dalam perspektif ini, IHDF berpotensi menjadi alternatif konseptual yang lebih representatif untuk mengukur pembangunan manusia di negara-negara Muslim pada abad ke-21 (Bedoui & Mansour, 2015; Auda, 2008).

SIMPULAN

Human Development Index (HDI) telah memberikan kontribusi penting dalam menggeser paradigma pembangunan dari orientasi pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan yang berpusat pada manusia. Melalui pengukuran kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, HDI mampu menyediakan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup masyarakat dibandingkan indikator ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketiga dimensi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan sebagian tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql), dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian,

secara konseptual HDI tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan manusia dalam Islam.

Meskipun demikian, hasil telaah menunjukkan bahwa HDI belum sepenuhnya mampu merepresentasikan konsep kesejahteraan yang komprehensif menurut ekonomi Islam. Keterbatasan tersebut terlihat dari belum terakomodasinya dimensi perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta absennya indikator yang mengukur kualitas spiritual, moralitas, keadilan distributif, solidaritas sosial, integritas institusi, dan keberlanjutan antargenerasi. Akibatnya, peningkatan nilai HDI tidak selalu mencerminkan tercapainya kesejahteraan yang holistik sebagaimana dimaksud dalam konsep falāḥ dan kemaslahatan dalam Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan pengembangan kerangka pengukuran pembangunan manusia yang mengintegrasikan indikator-indikator pembangunan modern dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah. Model Islamic Human Development Framework (IHDF) menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memasukkan dimensi religiositas, kualitas keluarga, keadilan sosial, tata kelola yang baik, filantropi Islam, dan keberlanjutan lingkungan ke dalam sistem pengukuran pembangunan manusia. Kerangka ini memungkinkan evaluasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada capaian material, tetapi juga pada pembentukan kualitas spiritual, moral, dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam harus dipahami sebagai proses pengembangan manusia secara utuh yang mencakup aspek fisik, intelektual, ekonomi, sosial, dan spiritual. Integrasi antara HDI dan maqāṣid al-sharī‘ah dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan manusia yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang lebih luas dan berjangka panjang.

REFERENSI

Ahmad, K. (2002). Studies in Islamic economics. Leicester: The Islamic Foundation.

Al-Attas, S. M. N. (1995). Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Alkire, S. (2010). Human development: Definitions, critiques, and related concepts. Human Development Research Paper 2010/01. United Nations Development Programme. DOI: 10.2139/ssrn.1815263

Alkire, S., & Foster, J. (2010). Designing the inequality-adjusted Human Development Index (IHDI). Human Development Research Paper 2010/28. United Nations Development Programme.

Ahmed, H. (2002). Theoretical foundations of Islamic economics. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London: The International Institute of Islamic Thought.

Bedoui, H. E. (2012). Shari'a-based ethical performance measurement framework. Chair for Ethics and Financial Norms Working Paper Series. DOI: 10.12816/0001454

Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2015). Performance and maqasid al-shari'ah's pentagonal framework. Research in International Business and Finance, 35, 558–564. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.05.005

Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Costanza, R., Kubiszewski, I., Giovannini, E., Lovins, H., McGlade, J., Pickett, K. E., ... Wilkinson, R. (2016). Time to leave GDP behind. Nature, 505(7483), 283–285. https://doi.org/10.1038/505283a

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-Shariah and its implication for Islamic finance. Islam and Civilisational Renewal, 2(2), 316–336.

Fleurbaey, M. (2009). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. Journal of Economic Literature, 47(4), 1029–1075. https://doi.org/10.1257/jel.47.4.1029

Haq, M. ul. (1995). Reflections on human development. New York: Oxford University Press.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice. Singapore: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118390474

Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shariah made simple. London: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).

Klugman, J., Rodríguez, F., & Choi, H. J. (2011). The HDI 2010: New controversies, old critiques. Journal of Economic Inequality, 9(2), 249–288. https://doi.org/10.1007/s10888-011-9178-z

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2015). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. Journal of Islamic Finance. DOI: 10.12816/0019094

Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on maqasid al-Shariah framework. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

Naqvi, S. N. H. (2003). Perspectives on morality and human well-being: A contribution to Islamic economics. Leicester: The Islamic Foundation.

Obaidullah, M., & Shirazi, N. S. (2015). Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Rosly, S. A. (2010). Critical issues on Islamic banking and financial markets. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.

Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Alfred A. Knopf.

Streeten, P., Burki, S. J., Haq, M. ul, Hicks, N., & Stewart, F. (1981). First things first: Meeting basic human needs in developing countries. New York: Oxford University Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). Economic development (13th ed.). Boston: Pearson.

UNDP. (2024). Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock Reimagining cooperation in a polarized world. New York: United Nations Development Programm.